

PENGARUH PENURUNAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Gordius Woltman Tuga^{1*}, Nunung Nuryartono², Manutun Parulian Hutagaol², Widyastutik²

¹ Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Departemen Ekonomi dan Sumber Daya Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Indonesia

² Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor, Indonesia

*Email: woltmangordius@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggunakan model regresi panel di 21 kabupaten selama periode 2012–2024, dan mencakup variabel lain termasuk modal fisik (infrastruktur) dan modal sosial (pendidikan, kesehatan, dan indeks pembangunan manusia). Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional lebih dipengaruhi oleh aspek sosial yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia daripada faktor fisik. Peningkatan dalam pendidikan dan kesehatan telah terbukti memperkuat produktivitas tenaga kerja, sementara mengurangi tingkat kemiskinan memainkan peran penting dalam memperluas daya beli dan merangsang kegiatan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, variabel infrastruktur belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB, yang menunjukkan bahwa dampaknya bersifat jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan faktor inti yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan daerah. Rekomendasi kebijakan berfokus pada intervensi sektoral, spasial, dan kelembagaan. Selain itu, penerapan model program pengurangan kemiskinan harus bersifat spesifik wilayah dan perbaikan tata kelola kelembagaan pembangunan melalui koordinasi lintas sektor diperlukan agar program penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan konsisten sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan di NTT.

Kata kunci: Ekonomi Pembangunan, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi

THE EFFECT OF POVERTY REDUCTION ON REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

ABSTRACT

This study analyzes the impact of poverty on regional economic growth in the province of East Nusa Tenggara (NTT) using a panel regression model across 21 districts for the period 2012–2024. In addition to poverty, other variables such as physical capital (infrastructure) and social capital (education, health, and the Human Development Index) are also considered. The results show that regional economic growth is more strongly influenced by social aspects related to the quality of human resources than by physical factors. Improvements in education and health demonstrably boost labor productivity, while poverty reduction significantly contributes to increasing purchasing power and stimulating community economic activity. Infrastructure variables, on the other hand, have no significant impact on GDP, suggesting a long-term effect. These findings confirm that poverty is a core factor that needs to be prioritized in regional development policies. Policy recommendations focus on sectoral, spatial, and institutional. Furthermore, the implementation of poverty alleviation program models must be region-specific, and improvements in institutional governance through cross-sectoral coordination are necessary to ensure more effective and consistent poverty alleviation programs, tailored to regional conditions and local community needs. This approach is expected to encourage inclusive, high-quality, and equitable regional economic growth in NTT.

Keywords: Development Economics, Poverty, Economic Growth

PERNYATAAN KUNCI

- Penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama pembangunan NTT.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal sangat penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- Pengelolaan sumber daya alam NTT perlu diarahkan pada prinsip keberlanjutan dan penguatan nilai-nilai sosial budaya seiring dengan meningkatnya perekonomian daerah

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pemerintah daerah di Provinsi NTT perlu memprioritaskan penanggulangan kemiskinan sebagai fokus utama pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih layak, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Langkah-langkah ini akan membantu masyarakat keluar dari siklus kemiskinan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan perspektif lingkungan, kebijakan pembangunan harus menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak merusak ekosistem yang menjadi tumpuan masyarakat. Sementara itu, dari perspektif sosial budaya, penguatan nilai-nilai gotong royong, kearifan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dapat memastikan kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian identitas dan budaya daerah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang perlu diatasi karena dapat berdampak pada kemungkinan penurunan produksi suatu negara. Meskipun terjadi kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan globalisasi yang pesat, kemiskinan tetap menjadi masalah global yang terus berlanjut (UNDP 2024; World Bank 2024; Xiao *et al.* 2024). Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan (Gordon 2006). Studi lain yang berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar menemukan bahwa tanpa upaya khusus untuk membuka akses pasar dan layanan di wilayah terpencil, program nasional cenderung tidak efektif menurunkan kemiskinan secara

berkelanjutan (Wijaya *et al.* 2022). Kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus karena keterbatasan pendidikan menghambat individu memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidupnya (Kakwani 2013; Rohima *et al.* 2013). Akses kesehatan yang buruk menurunkan produktivitas dan partisipasi ekonomi, sementara infrastruktur yang tidak memadai serta kondisi lingkungan yang buruk memperburuk keadaan. Selain itu, kemiskinan tidak hanya terjadi di negara berkembang; bahkan di negara maju, masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan menghadapi ketidakamanan pangan, perumahan, serta ketidakstabilan ekonomi (Rabbitt *et al.* 2023). Ketimpangan pendapatan yang semakin melebar juga memperburuk situasi ini, memperbesar jarak antara si kaya dan si miskin, sebagaimana terjadi di Indonesia (Resosudarmo dan Vidyattama 2006; Kaswanto dan Utami 2016).

Todaro (2000) juga mencermati beberapa karakteristik yang terdapat pada penduduk miskin di negara-negara dunia ketiga, yaitu mayoritas proporsi penduduk miskin terdapat di daerah perdesaan, keluarga yang paling miskin umumnya merupakan orang tua tunggal dengan wanita sebagai kepala keluarga. Selain itu terdapat faktor lainnya yang belum dikemukakan secara eksplisit oleh Todaro yang turut mempengaruhi kemiskinan yaitu tingkat pendidikan kepala keluarga dan akses terhadap sumber daya termasuk akses terhadap sumber daya finansial. Pada sisi kebijakan pola-pola pertumbuhan dan kegagalan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan juga turut berperan dalam berlanjutnya tingkat kemiskinan yang masif.

Hafizhah (2022) menyatakan bahwa penyebab utama peningkatan kemiskinan selain tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan pekerjaan, produktivitas dan kondisi keterisolasi. Keterbatasan dan keterisolasi berdampak positif terhadap persentase penduduk miskin. Sejumlah studi pada konteks Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan akses infrastruktur dan keterisolasi wilayah berkorelasi positif dengan persentase penduduk miskin. Studi komparatif oleh Nurmala (2022) menemukan bahwa efek pengurangan kemiskinan dari pembangunan infrastruktur jauh lebih kecil di kawasan timur Indonesia wilayah yang karakteristiknya ditandai oleh keterisolasi

geografis dan terbatasnya konektivitas pasar sehingga keterisolasi menjadi salah satu faktor penopang tingginya angka kemiskinan.

Faktor lain yang juga berpengaruh pada kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran menimbulkan dampak menurunkan pendapatan masyarakat dan kemakmuran yang telah dicapai. Semakin menurun kemakmuran akan menimbulkan masalah kemiskinan.

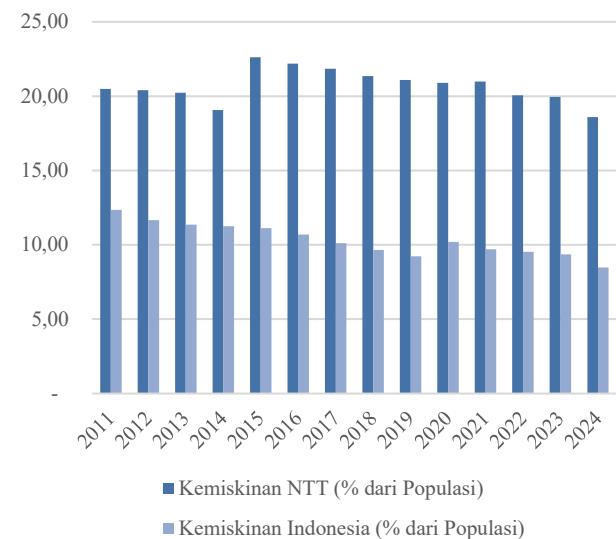
Penanggulangan kemiskinan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketika kemiskinan berkurang, daya beli masyarakat meningkat, mendorong permintaan barang dan jasa di tingkat lokal. Hal ini menciptakan efek pengganda pada aktivitas ekonomi dan lapangan kerja di berbagai sektor (Nurmala 2022; Wijaya *et al.* 2022). Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan bukan hanya tujuan sosial, tetapi juga strategi ekonomi yang efektif untuk memperkuat pertumbuhan PDRB yang berkelanjutan. Isu ini menjadi penting dalam konteks negara-negara yang daerahnya masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, menghambat perekonomian nasional.

SITUASI TERKINI

Indonesia memiliki populasi yang besar dan beragam, dengan lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau. Keragaman geografis dan demografis ini menciptakan tantangan tersendiri bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan relatif stabil, distribusi kekayaan yang tidak merata telah menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mendalam.

Wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya telah menikmati pembangunan yang pesat, sementara banyak wilayah pedesaan dan terpencil, terutama di Indonesia bagian timur seperti Papua, NTT, dan Maluku, masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi (BPS 2024). Kemiskinan di Indonesia tidak hanya ditandai oleh pendapatan rendah tetapi juga oleh kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Banyak wilayah pedesaan, akses terhadap air bersih dan listrik masih terbatas, sehingga memperburuk

kondisi kehidupan. Lebih lanjut, sektor pertanian, tulang punggung perekonomian sebagian besar penduduk pedesaan, seringkali tidak menyediakan pendapatan mencukupi memenuhi kebutuhan dasar, sehingga perubahan iklim memengaruhi pola tanam dan hasil panen (Marlianti *et al.* 2017; Rejekiningrum dan Kartiwa 2022).



Gambar 1. Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan NTT

Sumber: BPS (2025)

Situasi kemiskinan NTT dapat dilihat dari persentase penduduk miskin yang masih cukup tinggi dibandingkan provinsi lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin NTT pada tahun 2023 tercatat sekitar 19,96%, berbeda signifikan dengan kemiskinan nasional 9,36% (Gambar 1).

Secara umum, status ekonomi NTT masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, meskipun terdapat beberapa upaya untuk memperbaiki kondisi ini. Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi NTT, dengan sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari sektor ini. Namun, sektor pertanian di NTT masih terbatas pada skala kecil dan subsisten, dengan hasil yang rentan terhadap perubahan cuaca dan teknologi yang terbatas.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di NTT juga telah mengalami berbagai transformasi, sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika lokal. Berbagai program telah diluncurkan, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan-kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai

tantangan, terutama dalam hal implementasi di lapangan dan pelibatan masyarakat setempat. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan di NTT, mulai dari program penanggulangan kemiskinan skala nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga program-program lokal yang difokuskan pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Namun, meskipun banyak program telah dilaksanakan, dampaknya seringkali belum optimal. Tingginya angka kemiskinan dan disparitas antar daerah di NTT menyoroti tantangan yang signifikan dalam melaksanakan kebijakan yang ada.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan data panel sekunder yang mencakup 21 kabupaten di NTT selama periode 2012–2024. Pendekatan regresi panel diadopsi untuk mengkaji pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dengan menggunakan kerangka kerja panel statis, analisis ini membandingkan tiga model estimasi, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). CEM mengasumsikan bahwa semua unit cross-sectional memiliki karakteristik homogen, yang menyiratkan tidak ada perbedaan individual atau temporal; oleh karena itu, satu garis regresi mewakili seluruh dataset. Sebaliknya, FEM mengakui heterogenitas yang tidak teramat dengan memungkinkan setiap entitas (dalam hal ini, setiap kabupaten) memiliki intersepsi sendiri, yang menangkap faktor-faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, REM juga memperlakukan efek individual ini sebagai acak dan tidak terkait dengan variabel penjelas, dengan asumsi bahwa variasi antar entitas muncul dari komponen acak yang sama.

Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow dan Hausman untuk mengidentifikasi spesifikasi yang paling tepat untuk dataset tersebut. Dengan menggunakan beberapa literatur sebelumnya, penelitian ini mengembangkan model berdasarkan teori kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dengan tambahan variabel modal fisik dan sosial (Asadi *et al.* 2008; Kaswanto dan Muttaqin 2013; Skare *et al.* 2016; Pomi *et al.* 2021). Oleh karena itu, model dalam studi ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Log(GRDPit)} = a_0 + a_1 \text{Log(POVit)} + a_2 \text{Log(HDIit)} + a_3 \text{Log(HEAit)} + a_4 \text{Log(EDUit)} + a_5 \text{Log(INFRAit)} + eit \quad (1)$$

Dimana GRDPCit adalah produk domestik regional bruto per kapita di kabupaten i pada periode t, POVit adalah tingkat kemiskinan di kabupaten i pada periode t, HDIit adalah indeks pembangunan manusia di kabupaten i pada periode t, HEAit adalah kesehatan di kabupaten i pada periode t, EDUit adalah partisipasi pendidikan di kabupaten i pada periode t, INFRAit adalah infrastruktur di kabupaten i pada periode t, dan eit adalah suku residual.

Penggunaan variabel GRDP per kapita sebagai variabel dependen bertujuan untuk menangkap tingkat kinerja ekonomi suatu wilayah secara menyeluruh. GRDP per kapita digunakan sebagai indikator kapasitas produksi daerah dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Todaro dan Smith 2020). Dengan demikian, peningkatan atau penurunan GRDP per kapita mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi regional.

Variabel tingkat kemiskinan (POV) dimasukkan sebagai variabel independen karena kemiskinan memiliki hubungan kausal dua arah dengan pertumbuhan ekonomi. Tingginya kemiskinan menekan konsumsi, menghambat produktivitas tenaga kerja, serta mengurangi kemampuan rumah tangga untuk mengakses pendidikan dan kesehatan, sehingga melemahkan pertumbuhan ekonomi daerah (Ravallion 2016; Kaswanto *et al.* 2017; Adriyani 2021; Wulan *et al.* 2021). Oleh karena itu, kemiskinan merupakan determinan penting dalam model pertumbuhan ekonomi wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index* - HDI) dipertimbangkan karena mencerminkan kualitas modal manusia, yang terbukti memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan jangka panjang melalui penciptaan tenaga kerja produktif dan peningkatan kualitas inovasi (UNDP 2024; Barro 2013). Daerah dengan tingkat HDI yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas ekonomi lebih baik.

Variabel kesehatan (HEA) dipilih sebagai pengukur lebih spesifik dari komponen HDI untuk menekankan bahwa aspek kesehatan tidak hanya menentukan angka harapan hidup, tetapi juga kemampuan tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Kesehatan masyarakat yang buruk sering mengunci rumah tangga dalam “*low productivity, low income trap*” (Bloom dan Canning 2019).

Variabel pendidikan (EDU) masuk ke model untuk memisahkan peran partisipasi pendidikan secara langsung, karena pendidikan tidak hanya meningkatkan modal manusia, tetapi juga memfasilitasi pergeseran tenaga kerja ke sektor berproduktivitas tinggi, mendorong inovasi, dan memperluas kesempatan kerja (Hanushek dan Woessmann 2015).

Variabel infrastruktur (INFRA) digunakan karena infrastruktur merupakan prasyarat penting pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya logistik, memperluas akses pasar, mempercepat mobilitas tenaga kerja, serta meningkatkan penyebaran aktivitas ekonomi ke wilayah pinggiran (Aschauer 1989; Calderón dan Servén 2014). Sejumlah penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa pemerataan infrastruktur memiliki hubungan positif dengan penurunan kemiskinan dan percepatan aktivitas ekonomi regional (Azhar dan Suryahadi 2022).

ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Tabel 1 mengungkapkan hasil dari analisis regresi yang ditawarkan. Berdasarkan hasil pengujian model, uji Chow dan Hausman menunjukkan bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang paling sesuai untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian terhadap PDRB. Hasil uji Chow menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0.000, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antar unit observasi sehingga model FEM lebih tepat dibandingkan model CEM. Selanjutnya, hasil uji Hausman juga menunjukkan nilai probabilitas 0.000 dengan nilai statistik sebesar 35.217, yang mengindikasikan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan model REM. Dengan demikian, analisis selanjutnya difokuskan pada interpretasi hasil regresi model FEM karena model ini mampu menangkap efek spesifik antar daerah yang tidak terdeteksi oleh model lain.

Berdasarkan hasil estimasi pada model FEM, beberapa variabel menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PDRB. Variabel kemiskinan (LogPOV) berpengaruh positif sebesar 0,129 yang menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan berkorelasi dengan peningkatan PDRB. Indeks pembangunan manusia (LogHDI) memiliki pengaruh positif sebesar 1,127 menandakan bahwa peningkatan kualitas manusia secara langsung meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Variabel pendidikan (LogEDU)

jugaberpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,111 yang mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pendidikan mampu memperkuat daya saing dan output regional. Sementara itu, variabel kesehatan (LogHEA) memiliki koefisien terbesar, yaitu 5,954 menegaskan bahwa peningkatan belanja kesehatan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi daerah. Sebaliknya, variabel infrastruktur (LogINFRA) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, menandakan bahwa pembangunan fisik belum memberikan efek langsung terhadap peningkatan PDRB pada periode pengamatan.

Tabel 1. Hasil Regresi Panel

Variable	CEM	FEM	REM
Constant	22,231*** (2,344)	-2,032 (1,255)	-1,063 (1,237)
Log(POVit)	0,441*** (0,040)	0,129*** (0,038)	0,168*** (0,036)
Log(HDIit)	4,222*** (0,492)	1,127*** (0,147)	1,179*** (0,146)
Log(HEAit)	-3,548*** (0,675)	5,954*** (0,404)	5,636*** (0,398)
Log(EDUi)	-0,010 (0,107)	0,111*** (0,020)	0,107*** (0,020)
Log(INFRAit)	0,278*** (0,044)	-0,013 (0,011)	-0,011 (0,011)
R-Squared	0,674	0,993	0,885
Adjusted R-squared	0,668	0,993	0,883
F-Statistic	110,587*** (Prob)	1440,544 (0,000)	411,879*** (0,000)
Chow-Test	-	1055,724*** (0,000)	-
Hausman-Test	-	-	35,217*** (0,000)

Catatan: *, **, dan *** adalah signifikan pada tingkat 10%, 5% dan 1%

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan pertumbuhan ekonomi daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia disbandingkan dengan faktor fisik. Peningkatan pendidikan dan kesehatan memperkuat produktivitas tenaga kerja, sementara penurunan kemiskinan memperluas basis konsumsi dan aktivitas ekonomi. Hasil yang tidak signifikan pada variabel infrastruktur dapat diartikan bahwa dampak pembangunan infrastruktur cenderung bersifat jangka panjang dan baru akan terlihat pada periode berikutnya. Dengan demikian, kebijakan pengembangan ekonomi daerah perlu menekankan pada peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan, disertai strategi penurunan kemiskinan yang berkelanjutan agar pertumbuhan PDRB dapat tercapai secara inklusif dan merata.

Berdasarkan penelitian ini, arah kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan persisten dan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah seperti NTT harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-ekonomi dan keunggulan lokal. Tiga pilar kebijakan utama perlu menjadi fondasi dalam perencanaan pembangunan daerah agar program yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat secara sementara, tetapi juga menciptakan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Pertama, penciptaan lapangan kerja produktif berbasis keunggulan wilayah menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan nilai tambah ekonomi. Struktur ekonomi NTT yang didominasi sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata harus dioptimalkan melalui industrialisasi berbasis sumber daya lokal misalnya pengolahan hasil pertanian, pengembangan industri pengolahan daging sapi beku dan panggang (se'i), hilirisasi perikanan, dan pariwisata berbasis budaya dan lanskap alam. Dengan menggeser aktivitas ekonomi dari sekadar produksi bahan mentah menjadi produksi bernilai tambah, peluang kerja produktif bagi masyarakat pedesaan akan terbuka lebih luas. Kebijakan ini tidak hanya memperbesar pendapatan, tetapi juga mendorong mobilitas tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor berproduktivitas lebih tinggi, sehingga mempercepat transformasi struktur ekonomi daerah.

Kedua, pemberdayaan UMKM secara terukur dan terintegrasi dalam rantai pasok regional diperlukan untuk memperkuat kapasitas usaha masyarakat secara berkelanjutan. UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal, namun perkembangannya masih terpencar dan tidak terkoneksi dengan pasar besar, teknologi, dan logistik. Oleh karena itu, pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan modal, tetapi harus mencakup pendampingan usaha, pelatihan manajemen dan teknologi, pembiayaan produktif bunga rendah, serta kemitraan usaha dengan industri dan pasar. Integrasi UMKM ke dalam *value chain regional* baik melalui koperasi, kelembagaan ekonomi desa, maupun jejaring pemasaran digital akan menciptakan stabilitas usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin dalam jangka panjang.

Ketiga, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang diarahkan pada peningkatan kualitas modal manusia harus menjadi agenda utama pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan vokasi akan membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sektor unggulan daerah. Di sisi lain, layanan kesehatan preventif, intervensi gizi, dan program penurunan angka stunting sangat penting untuk memutus perangkap *malnutrition low income* yang selama ini menghambat produktivitas tenaga kerja. Kombinasi kebijakan pendidikan dan kesehatan yang tepat sasaran akan mempercepat mobilitas tenaga kerja menuju sektor berproduktivitas tinggi dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pekerjaan subsisten.

Selain ketiga pilar tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan model program pengurangan kemiskinan harus bersifat spesifik wilayah (*place based*), bukan seragam seperti pendekatan nasional *one size fits all* yang selama ini diterapkan. Karakteristik sosial, ekonomi, geografis, dan budaya setiap wilayah berbeda sehingga kebijakan harus disesuaikan dengan konteks lokal, sumber daya yang tersedia, dan struktur pasar di masing-masing daerah. Strategi berbasis wilayah memungkinkan intervensi kebijakan menjawab akar permasalahan kemiskinan secara lebih akurat dan efektif.

Lebih jauh lagi, efektivitas strategi penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada perbaikan tata kelola kelembagaan pembangunan dan koordinasi lintas sektor. Walau tidak secara terbuka ditampilkan pada variabel yang dipilih, namun pelaksanaan pembangunan terutama program pengurangan kemiskinan yang dilaksanakan sangat berhubungan dengan aspek kelembagaan yang masih belum maksimal berperan di wilayah subsisten seperti di NTT. Sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, akademisi, sektor swasta, dan lembaga kemasyarakatan perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi implementasi program, mengatasi duplikasi kebijakan, serta membangun kesinambungan antarkebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan tata kelola pembangunan yang terkoordinasi, intervensi yang dilaksanakan tidak akan berjalan terfragmentasi dan hasilnya mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyani FY. 2021. Desain Penyelenggaraan Penyuluhan Mendukung Program Kawasan Pertanian Sejahtera Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 8(2): 77-86.
- Asadi A, Akbari M, Fami HS, Iravani H, Rostami F, Sadati A. 2008. Poverty Alleviation and Sustainable Development: the Role of Social Capital. *Journal of Social Sciences* 4(3): 202-215.
- Aschauer DA. 1989. Is Public Expenditure Productive? *Journal of Monetary Economics* 23(2): 177–200.
- Azhar A, Suryahadi A. 2022. Infrastructure Inequality and Regional Poverty Reduction in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 58(1): 53–76.
- Barro RJ. 2013. *Education and Economic Growth*. MIT Press.
- Bloom D, Canning D. 2019. The Health and Economic Growth Nexus. *Global Health Economics* 7(1): 15–27.
- Calderón C, Servén L. 2014. Infrastructure, Growth and Inequality: Evidence from Developing Countries. *Journal of Development Economics* 113: 22–37.
- Gordon D. 2006. The Concept and Measurement of Poverty. *Poverty and Social Exclusion in Britain* 29-70. Policy Press.
- Hafizhah I. 2022. Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2021 (Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hanushek EA, Woessmann L. 2015. The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth. MIT Press.
- Kakwani N. 1993. Poverty and Economic Growth with Application to Côte d'Ivoire. *Review of Income and Wealth* 39(2): 121–139.
- Kaswanto RL, Filqisthi TA, Choliq MBS. 2017. Revitalisasi Pekarangan Lanskap Perdesaan sebagai Penyedia Jasa Lanskap untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Lanskap Indonesia* 8(1): 50-60.
- Kaswanto RL, Muttaqin T. 2013. Revitalisasi Pekarangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Agroforestri. Balai Penelitian Teknologi Agroforestri*.
- Kaswanto RL, Utami FNH. 2016. The Disparity of Watershed Development between Northern Southern Region of Java Island. *Procedia Environmental Sciences* 33: 21-26.
- Nurmala N. 2022. Membandingkan Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia serta Implikasi Kebijakan. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 9(3).
- Pomi SS, Sarkar SM, Dhar BK. 2021. Human or Physical Capital, which Influences Sustainable Economic Growth Most? A Study on Bangladesh. *Canadian Journal of Business and Information Studies* 3(5): 101-108.
- Rabbitt MP, Hales LJ, Burke MP, Coleman-Jensen A. 2023. *Household Food Security in the United States in 2022*.
- Ravallion M. 2016. The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy. Oxford University Press.
- Rejekiningrum P, Kartika B. 2022. Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Panen Air Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 9(1): 37-51.
- Resosudarmo BP, Vidyattama Y. 2006. Regional Income Disparity in Indonesia. *ASEAN Economic Bulletin* 31-44.
- Rohima S, Suman, A, Manzilati A, Ashar K. 2013. Vicious Circle Analysis of Poverty and Entrepreneurship. *IOSR Journal of Business and Management* 7(1): 33-46.
- Škare M, Družeta RP. 2016. Poverty and Economic Growth: A Review. *Technological and Economic development of Economy* 22(1): 156-175.
- Todaro MP, Smith SC. 2020. Pearson Education Limited, United Kingdom.
- UNDP. 2024. Human Development Report 2023/2024: Global Report (Human Development Report). United Nations Development Programme.
- Wijaya O, Juniarwan W, Widodo. 2022. Alternatif Kebijakan Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Banyumas dengan Pendekatan Cluster Analysis. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 9(3): 133–148.
- World Bank. 2024. The Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024. World Bank Group.
- Wulan S, Rahayu D, Ruskha R. 2021. Persistent poverty and regional growth disparity in Eastern Indonesia. *Journal of Regional Development Studies* 15(2): 112–128.